

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

Nomor Publikasi: 33015.1903

Katalog BPS: 4102004.3301

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah halaman: xvi + 108 halaman

Naskah: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh: ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Dicetak Oleh: CV. Wahana Jaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this book for commercial purposes without the written permission of the Central Bureau of Statistics.

TIM PENYUSUN



Penanggungjawab Umum
Toto Desanto, S.Si, M.Si

Penyunting:
Akhmad Purnomo, SE

Penulis:
Fitria Ekawati, A.Md
Lulu Lestari, SST
Yuffie Dwi Azmi Hanizal, A.Md

Pengolah Data:
Lulu Lestari, SST

Penyusun:
Lulu Lestari, SST

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap Tahun 2018 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap yang didalamnya membahas tentang kondisi terkini kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut meliputi aspek: kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, dan kemiskinan. Data yang digunakan berasal dari survei-survei BPS dan data dari instansi lain yang terkait. Publikasi ini diharapkan mampu digunakan sebagai salah satu acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kesejahteraan masyarakat Cilacap kedepan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap Tahun 2018 memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Cilacap, November 2019

Kepala BPS Kabupaten Cilacap



Toto Desanto, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VII
Daftar Tabel	IX
KEPENDUDUKAN CILACAP	1
JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN	2
PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK	3
ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN	4
WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA	5
PENGUNAAN ALAT/CARA KB	5
KESEHATAN & GIZI CILACAP	8
DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK	8
TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA	9
PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN	12
PENDIDIKAN CILACAP	14
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	15
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	17
KETENAGAKERJAAN CILACAP	19
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	20
LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN	22
PEKERJA MENURUT USIA	23
TARAF & POLA CILACAP	25
PENGELUARAN RUMAH TANGGA	25
KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN	29
PERUMAHAN CILACAP	30
GAMBARAN PERUMAHAN DI INDONESIA	30
KONDISI FISIK BANGUNAN	31
FASILITAS PERUMAHAN	34

STATUS KEPEMILIKAN RUMAH	35
KEMISKINAN CILACAP.....	37
PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN	37
KARAKTERISTIK PENDIDIKAN RUTA MISKIN	40
KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN RUTA MISKIN	40
KARAKTERISTIK KESEHATAN RUTA MISKIN	41
KARAKTERISTIK PERUMAHAN RUTA MISKIN	42

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Cilacap, 2014-2018	2
Gambar 1.2 Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2014-2018	2
Gambar 1.3 Kepadatan penduduk kabupaten Cilacap (jiwa/km ²), 2014-2018	3
Gambar 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017	5
Gambar 2.1 Angka kesakitan dan rata-rata lamanya sakit di kabupaten Cilacap, 2017	8
Gambar 2.2 Cakupan imunisasi menurut jenisnya di kabupaten Cilacap, 2016-2018	11
Gambar 2.3 Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat dan klasifikasi wilayah di kabupaten Cilacap, 2016-2017.....	12
Gambar 3.1 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap, 2016-2017	15
Gambar 3.2 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap tahun 2016-2017	16
Gambar 4.1 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015-2017	20
Gambar 4.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015 dan 2017.	22
Gambar 4.3 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015 dan 2017	23
Gambar 5.1 Proporsi pengeluaran rumah tangga di kabupaten Cilacap, 2016-2018	26

Gambar 5.2 Distribusi pembagian pengeluaran per kapita di kabupaten Cilacap, 2013-2017	28
Gambar 5.3 Indeks Gini kabupaten Cilacap, 2013-2017	28
Gambar 6.1 Persentase rumah dengan atap layak, Kabupaten Cilacap 2016-2018	31
Gambar 6.2 Persentase rumah menurut jenis dinding, Kabupaten Cilacap 2018	32
Gambar 6.3 Persentase rumah berlantai layak, Kabupaten Cilacap 2016-2018	33
Gambar 6.4 Status kepemilikan rumah berdasarkan tipe wilayah di Kabupaten Cilacap tahun 2018.....	36
Gambar 7.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap 2014-2018.....	38
Gambar 7.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten Cilacap, 2016-2018	39
Gambar 7.3 Kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin di Cilacap tahun 2018	41
Gambar 7.4 Persentase penduduk miskin di Cilacap yang mengalami gangguan kesehatan, 2016-2018.....	42
Gambar 7.5 Persentase rumah tangga miskin Cilacap yang tidak memiliki fasilitas MCK dan sumber air minumnya tidak terlindung, 2016-2018.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2018	4
Tabel 1.2 Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi menurut daerah tempat tinggal dan alat/cara kontrasepsi yang digunakan di kabupaten Cilacap, 2016 dan 2017 ..	6
Tabel 2.1 Persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah disusui dan lamanya disusui	10
Tabel 3.1 Rata-rata lama sekolah (tahun) dan harapan lama sekolah (tahun).	14
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut usia sekolah dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2016-2017	17
Gambar 2.2 Cakupan imunisasi menurut jenisnya di kabupaten Cilacap, 2016-2018	11
Gambar 2.3 Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat dan klasifikasi wilayah di kabupaten Cilacap, 2016-2017.....	12
Gambar 3.1 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap, 2016-2017	14
Gambar 3.2 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap tahun 2016-2017	17
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut usia sekolah dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2016-2017	18
Tabel 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015-2017	24
Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per kapita menurut jenisnya di kabupaten Cilacap, 2016-2018.....	25
Tabel 5.2 Konsumsi energi dan protein per kapita per hari menurut daerah tempat tinggal di kabupaten Cilacap, 2016-2018	29
Tabel 6.1 Persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita, 2016-2017	33
Tabel 6.2 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan, 2016-2017	35
Tabel 7.1 Karakteristik pendidikan rumah tangga miskin di Cilacap, 2016-2017	40

KEPENDUDUKAN CILACAP

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebesar lima puluh enam persen penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa, termasuk provinsi Jawa Tengah. Penyumbang jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah adalah kota Semarang, kemudian



Sumber gambar: vektorstock.com

Kabupaten Brebes di urutan kedua dan kabupaten Cilacap di urutan ketiga. Jumlah penduduk yang tinggi merupakan tantangan bagi negara berkembang yang cenderung tinggi angka kelahirannya. Oleh karena itu muncul banyak teori dan penelitian untuk mengendalikan jumlah penduduk yang terus bertambah. Salah satunya teori neo-malthusian yang menggunakan cara *preventive checks* penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi angka kelahiran. Indonesia sudah menerapkan teori ini salah satunya dengan adanya program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana ini merupakan solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga terwujud penduduk yang sejahtera. Hal ini tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dengan visi “CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA” (bangga membangun desa). Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan menjadi Kabupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh kecamatan. Pencapaian visi tersebut memperhatikan BANGGA MBANGUN DESA yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

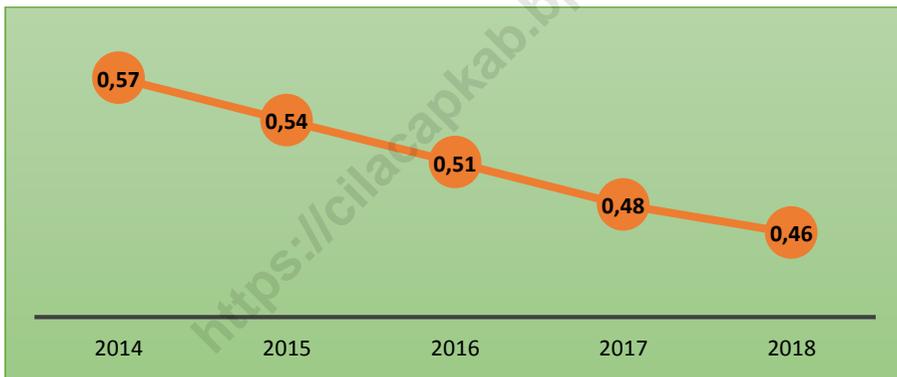
Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2020 tercatat sebanyak 1.719.504 jiwa. Memperhatikan laju pertumbuhan penduduk per tahun periode 2014-2018 maka pemerintah patut berbangga karena data laju pertumbuhan penduduk pertahun mengalami perlambatan. Tahun 2014 penduduk kabupaten Cilacap meningkat 9.533 jiwa dibanding tahun sebelumnya, tahun 2015 menurun dengan bertambah penduduk sebanyak 9.095 jiwa, terus menurun sampai tahun 2018 hanya bertambah 7.877 jiwa.

Secara persentase maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,57 persen, tahun 2015 sebesar 0,54 persen dan terus menurun hingga tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,46 persen. Bila membandingkan laju pertumbuhan penduduk di wilayah eks

Karesidenan Banyumas pada periode tahun 2017-2018 terlihat Kabupaten Cilacap memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah sedangkan Kabupaten Purbalingga memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 0,96 persen, diikuti Kabupaten Banyumas sebesar 0,85 persen dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,58 persen.

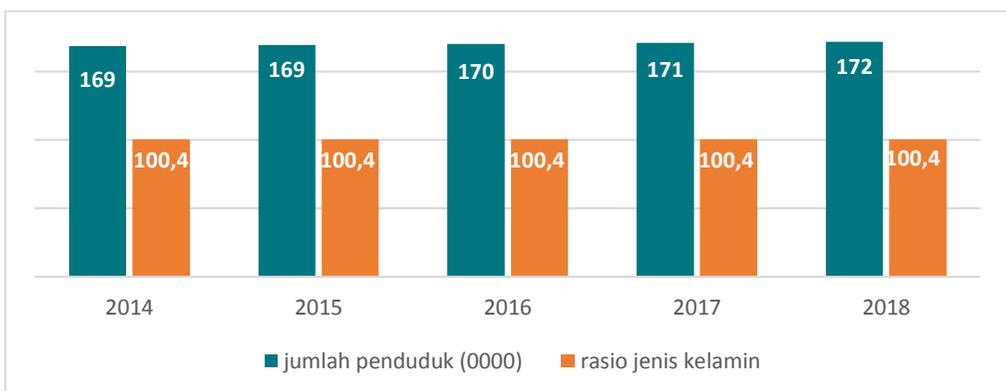
Dilihat berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 sebesar 100,35. Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 101 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Cilacap lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin Kabupaten Cilacap lebih besar bila dibandingkan dengan rasio jenis kelamin Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 98,35. Di provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin lebih dari 100 terdapat sebanyak 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Brebes.

Gambar 1.1 Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Cilacap, 2014-2018



Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

Gambar 1.2 Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2014-2018



Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia. Salah satunya Pulau Jawa yang luas wilayahnya hanya 7 persen dari wilayah Indonesia namun jumlah penduduknya mencapai 50 persen lebih dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Distribusi penduduk yang tidak merata ini mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi. Di wilayah eks karesidenan Banyumas, Kabupaten Banyumas memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 1.265 jiwa/km², selanjutnya Kabupaten Purbalingga sebesar 1.190 jiwa/km², Kabupaten Banjarnegara sebesar 858 jiwa/km² dan Kabupaten Cilacap 810 jiwa/km².

Melihat angka kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2018 terlihat Kecamatan Cilacap Selatan merupakan kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terbesar yaitu 9.263 jiwa/km². Sedangkan angka kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kumpanglaut yaitu sebesar 89 jiwa/km².

Gambar 1.3 Kepadatan penduduk kabupaten Cilacap (jiwa/km²), 2014-2018

2014 (798 jiwa/km²)



2015 (802 jiwa/km²)



2016 (806 jiwa/km²)



2017 (789 jiwa/km²)



2018 (810 jiwa/km²)



Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka beban ketergantungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah salah satu indikator kependudukan yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Selama periode tahun 2014-2018 angka ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 angka beban tanggungan Kabupaten Cilacap sebesar 51,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung 52 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2018

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	452,762	1,105,092	127,777	52.53
2015	449,482	1,113,565	131,679	52.19
2016	446,059	1,121,390	135,941	51.90
2017	442,667	1,128,364	140,596	51.69
2018	439,514	1,134,293	145,697	51.59

Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

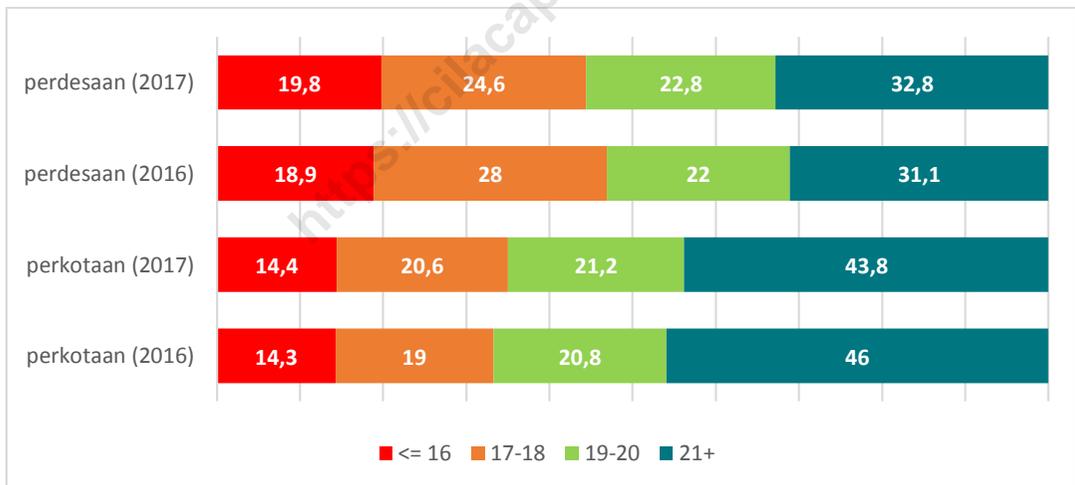
Rasio ketergantungan yang terus menurun beberapa tahun ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terjadi fenomena bonus demografi yang bisa menjadi peluang untuk memajukan kesejahteraan penduduk Indonesia dengan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ada sebanyak 26,86 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) hingga tahun 2018 terus turun menjadi 25,56 persen. Struktur umur penduduk kabupaten Cilacap masih didominasi oleh penduduk usia produktif mencapai 65,55 persen pada tahun 2014 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 65,96 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di kabupaten Cilacap menjadi sangat potensial sebagai modal yang besar untuk pembangunan. Sementara itu proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) semakin bertambah dari 7,58 persen pada tahun 2014 menjadi 8,47 persen pada tahun 2018.

WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA

Definisi usia perkawinan pertama adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hokum dan biologis yang pertama kali. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia perkawinan bagi wanita adalah minimal umur 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan anak usia minimal untuk menikah bagi wanita yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional usia perkawinan pertama idealnya usia 21 tahun hingga 25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama sebelum 21 tahun mengalami penurunan di wilayah perkotaan. Berbanding dengan hal tersebut, di wilayah perkotaan persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun keatas mengalami peningkatan. Hal ini merupakan indikasi positif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan. Faktor pendidikan paling berpengaruh karena wanita yang teredukasi cenderung untuk menunda usia perkawinan mereka.

Gambar 1.4 *Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017*



Sumber: Susenas

PENGGUNAAN ALAT/CARA KB

Menurut Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi program KB, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2017

persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mengalami sedikit penurunan baik di perkotaan maupun perdesaan. Penurunan persentase akseptor KB ini perlu dicermati sehingga tidak menjadi tren yang terus menurun setiap tahunnya. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal di tahun 2017 wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan, yaitu sebesar 54,59 persen sedangkan di perkotaan hanya 52,77 persen

Tabel 1.2 Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi menurut daerah tempat tinggal dan alat/cara kontrasepsi yang digunakan di kabupaten Cilacap, 2016 dan 2017

Alat/Cara Kontrasepsi (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2016 (2)	2017 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2016 (6)	2017 (7)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	6,65	4,72	2,61	0,92	3,95	2,28
IUD/AKDR/spiral	12,74	12,22	10,26	8,74	11,08	9,99
Suntikan	53,82	45,37	54,54	54,52	54,30	51,24
Susuk KB/Implan	5,58	5,06	10,37	12,30	8,78	9,70
Pil	13,19	23,74	20,89	18,10	18,34	20,12
Kondom pria/karet KB	3,45	4,36	0,44	3,10	1,44	3,55
Pantang berkala	2,12	4,52	0,46	1,95	1,01	2,87
Lainnya	2,45	0,00	0,44	0,38	1,11	0,24
% wanita yang menggunakan	62,73	52,77	68,02	54,95	66,18	54,14

Sumber: Susenas

Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di kabupaten Cilacap namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan dan pil yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek) yang rawan putus dalam penggunaannya. Pada tahun 2016 penggunaan alat KB suntikan mencapai 54,30 persen dan selanjutnya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 menjadi 51,24 persen. Sebaliknya penggunaan alat KB pil mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 20,12 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 18,34 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, di wilayah perkotaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi jangka panjang lebih tinggi daripada di perdesaan. Alat kontrasepsi jangka panjang antara lain MOW/tubektomi dan IUD/AKDR/spiral. Dari kedua alat kontrasepsi jangka panjang ini yang paling diminati adalah IUD/AKDR/spiral baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan karena alat kontrasepsi IUD/AKDR/spiral ini merupakan alat kontrasepsi yang paling efektif dan lebih sedikit efek sampingnya. Penggunaan IUD/AKDR/spiral di perkotaan pada dua tahun terakhir mengalami sedikit penurunan dari 12,74 persen pada tahun 2016 menjadi 12,22 persen pada tahun 2017. Sedangkan di wilayah perdesaan menurun dari 10,26 persen menjadi 8,74 persen.

<https://cilacapkab.bps.go.id>

KESEHATAN & GIZI

CILACAP



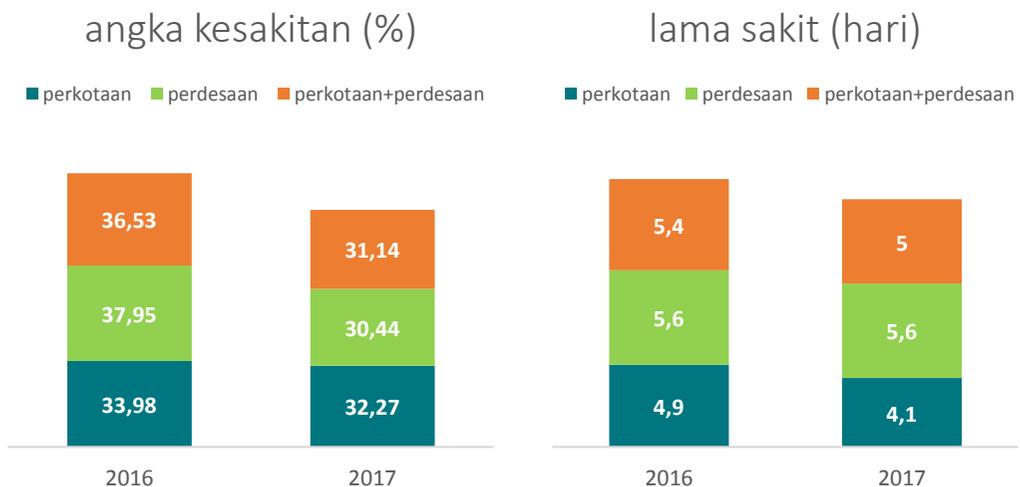
Sumber gambar: freepik.com

Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu komponen indikator pembangunan adalah tingkat kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Cilacap menuangkan program kesehatan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat.

DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Derajat kesehatan dapat digambarkan oleh 4 faktor yaitu faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, menurunnya kasus penyakit menular, penanganan balita gizi buruk yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Gambar 2.1 Angka kesakitan dan rata-rata lamanya sakit di kabupaten Cilacap, 2017



Sumber: Susenas

Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Susenas, Morbiditas atau angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Hasil susenas tahun 2017 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Cilacap mencapai 31,14 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 36,53 persen. Angka kesakitan penduduk tahun 2017 baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator lain selain angka kesakitan yaitu rata-rata lama sakit penduduk. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Hasil susenas 2017 menunjukkan penurunan rata-rata lamanya sakit sebesar 5 hari, sedangkan tahun sebelumnya 5,4 hari. Penurunan ini tidak cukup signifikan karena tidak terjadi di seluruh wilayah. Di wilayah perkotaan menunjukkan penurunan lamanya sakit dari 4,9 hari di tahun 2016 ke 4,1 hari di tahun 2017. Sedangkan di wilayah perdesaan lamanya sakit justru sama saja dari di tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebesar 5,6 hari. Semakin besar rata-rata lama sakit, maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA

Gizi yang baik adalah salah satu unsur penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Pemenuhan gizi anak harus diperhatikan sedini mungkin yaitu sejak masih dalam kandungan melalui makanan ibu hamil. Selain itu pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan karena ASI merupakan makanan pertama dan terbaik bagi bayi. ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat karena ASI mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri dan virus. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lainnya. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Pedoman pemberian makanan tambahan saat ini dikampanyekan oleh pemerintah dengan Pedoman Gizi Seimbang menggantikan slogan Makanan 4 Sehat 5 Sempurna. Istilah Makanan 4 Sehat 5 Sempurna tersebut mulai dikenalkan tahun 1952, namun slogan tersebut dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dan pemenuhan gizi manusia saat ini. Pedoman Gizi Seimbang mengacu pada *Nutrition Guide for Balanced*

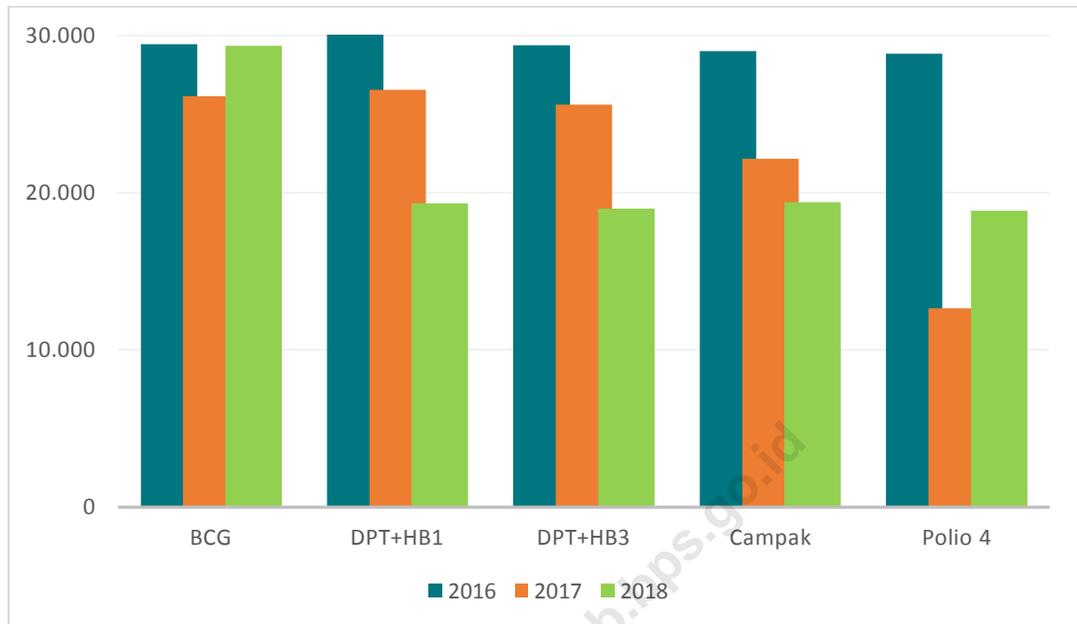
Diet, yaitu hasil kesepakatan konferensi pangan sedunia pada tahun 1992. Pedoman Gizi Seimbang memiliki 4 pilar prinsip yaitu : konsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, serta mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal.

Tabel 2.1 *Persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah disusui dan lamanya disusui*

Daerah tempat tinggal	Anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui (%)		Rata-rata lama disusui (bulan)		ASI Eksklusif (%)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	98,38	97,88	10,93	12,57	46,07	43,22
Perdesaan	97,01	98,34	10,91	10,25	31,92	32,17
Perkotaan+perdesaan	97,54	98,18	10,91	11,05	37,44	35,93

Sumber: Susenas

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui di Kabupaten Cilacap sebanyak 98,18 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 dengan persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui sebesar 97,54 persen. Rata-rata lama disusui juga mengalami peningkatan dari 10,91 bulan pada tahun 2016 menjadi 11,05 bulan pada tahun 2017. Banyak faktor yang menyebabkan ibu tidak memberikan ASI kepada anak mereka, diantaranya : ibu memiliki pekerjaan diluar rumah yang mengharuskan anak ditinggal pada suami atau pengasuh, kurangnya pengetahuan ibu akan manfaat ASI. Selain itu kendala ibu dalam menyusui ada dua faktor, pertama faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang manajemen laktasi, kedua faktor eksternal yaitu kurangnya ASI atau ASI belum keluar pada hari-hari pertama sehingga perlu tambahan susu formula, kurang mengertinya ibu tentang kolostrum dan masih ada anggapan bahwa ASI ibu kurang gizi dan kualitasnya tidak baik. Pemberian ASI eksklusif pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 35,93 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 37,44 persen. Secara wilayah di tahun 2017 pemberian ASI eksklusif lebih besar di wilayah perkotaan dibanding perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pemberian ASI eksklusif di wilayah perkotaan sudah cukup berhasil. Kampanye pemberian ASI eksklusif saat ini sudah mulai gencar diberbagai kalangan terutama melalui media sosial. Sehingga para ibu pekerja tetap bisa memberikan ASI secara eksklusif meskipun bekerja karena ada manajemen pemberian ASI yang baik.

Gambar 2.2 Cakupan imunisasi menurut jenisnya di kabupaten Cilacap, 2016- 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, imunisasi merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya dengan menurunkan angka kematian anak. Ada dua jenis imunisasi yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi yang wajib diberikan pada balita menurut pemerintah terdiri atas BCG, DPT, Polio, Campak/Morbilli dan Hepatitis B. Sedangkan imunisasi pilihan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan masing_masing antara lain vaksin MMR, Hib, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese Encephalitis, dan HPV. Seorang anak bisa dinyatakan memperoleh imunisasi lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, satu kali imunisasi campak dan tiga kali imunisasi hepatitis B.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (gambar 2.2) terjadi peningkatan terhadap cakupan imunisasi BCG. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi-bayi yang baru lahir telah diberikan tameng awal untuk memulai kehidupannya dengan intervensi medis. Diharapkan kematian bayi dapat ditekan dengan meningkatnya capaian imunisasi BCG. Akan tetapi, capaian imunisasi lanjutan untuk balita perlu ditingkatkan lagi karena persentasenya semakin menurun setiap tahunnya. Diharapkan seorang balita dapat terpenuhi kebutuhan imunisasi wajib dan imunisasi pilihan

sehingga derajat kesehatan mereka akan meningkat. Dengan kesehatan yang prima anak-anak akan tumbuh menjadi generasi cerdas dan berbakat.

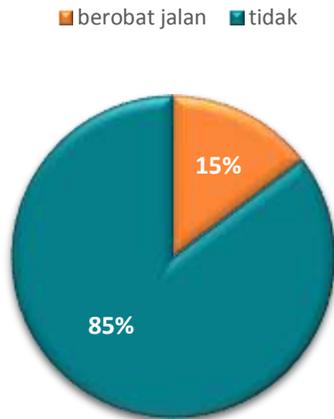
PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tertuang bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kesehatan bukan lagi hanya tanggung jawab pemerintah pusat namun juga mengikutsertakan peran dari daerah dan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari persentase penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Cilacap paling banyak adalah praktek dokter/klinik/bidan/balai pengobatan yakni sebesar 8,8 persen. Dipilihnya fasilitas kesehatan ini karena faktor akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan keberadaannya yang tersebar di seluruh wilayah. Selain itu prosedur pelayanannya relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan rumah sakit.

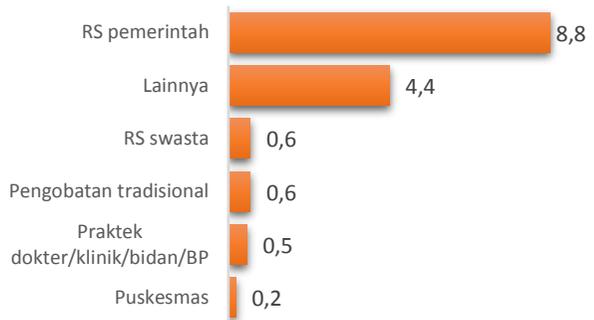
Gambar 2.3 Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat dan klasifikasi wilayah di kabupaten Cilacap, 2016-2017



2017



fasilitas berobat jalan



Sumber: Susenas

Dari hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa alternatif pengobatan tradisional paling rendah yaitu sebesar 0,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan medis masih tinggi, meskipun saat ini sudah banyak bermunculan pengobatan tradisional. Peran penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan premi yang terjangkau semua kalangan masyarakat. Namun kendati demikian kesadaran untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit secara preventif yang utama agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

PENDIDIKAN CILACAP

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” sebuah potongan kalimat yang sering kita dengar saat pembacaan pembukaan undang – undang dasar 1945. Satu satunya cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan merupakan hak segala bangsa, sebagaimana dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam hal ini pemerintah wajib membiayai pendidikan formal atau melalui sekolah



Sumber gambar: all-freownload.com 1

Sekolah merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 18 tentang pendidikan nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan adalah kunci bagi setiap warga negara untuk mendapat hak dan kewajiban dalam memperoleh ilmu

Tabel 3.1 Rata-rata lama sekolah (tahun) dan harapan lama sekolah (tahun)

Indikator pendidikan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-rata lama sekolah	6.58	*)	6.91	6.92
Laki-laki	7.14	*)	7.4	7.41
Perempuan	6.05	*)	6.44	6.45
Harapan lama sekolah	12.28	*)	12.3	12.48
Laki-laki	13.14	*)	12.91	12.92
Perempuan	12.14	*)	12.16	12.45

Sumber: IPM

*)data tidak tersedia

Secara umum di kabupaten Cilacap, rata – rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2018 sebesar 6.92 Tahun. Artinya, Bahwa rata- rata Penduduk Kabupaten Cilacap baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Jika dibandingkan rata- rata lama sekolah dari tahun 2015 sampai 2017, maka rata – rata sekolahnya semakin meningkat. Meningkatnya rata-rata lama sekolah tersebut tidak lepas dari upaya

pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kualitas pendidikan makin baik. Menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata rata pendidikan laki- laki dan perempuan terpaut 1 tahun.

Indikator pendidikan lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah atau 7 tahun keatas. HLS kabupaten cilacap pada tahun 2018 sebesar 12.48 tahun. Artinya anak usia 7 tahun keatas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12 tahun atau sampai lulus SLTA. Sama seperti rata – rata lama sekolah, angka HLS ini semain lama semakin meningkat. Jika diamati menurut jenis kelamin, HLS penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun perbedaannyatidak terlalu signifikan.

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Selain indikator rata-rata lama sekolah dan HLS, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.

Gambar 3.1 *Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap, 2016-2017*



Sumber: Susenas

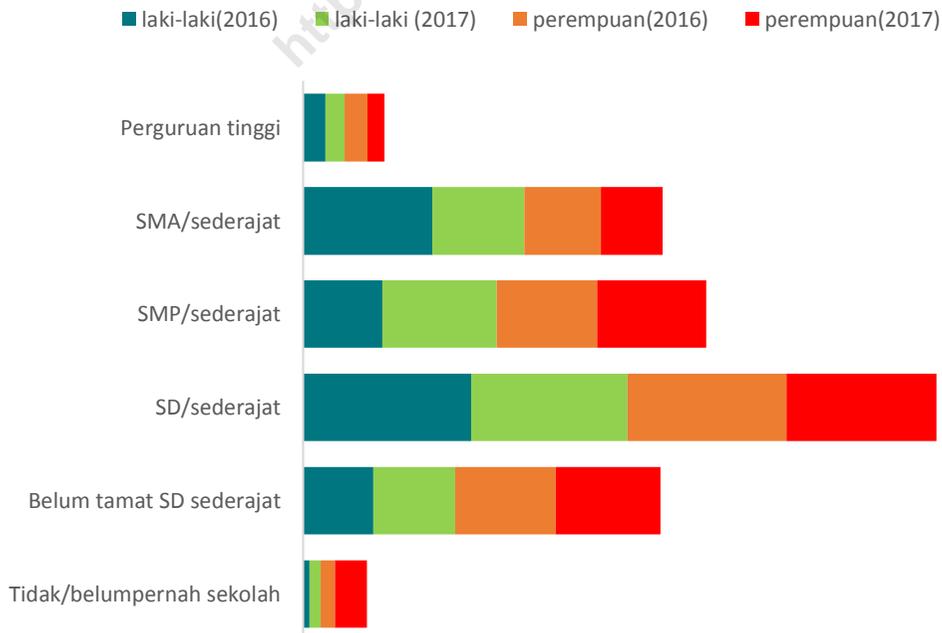
Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas SDM, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Tabel 3.2 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, dan SLTA/ sederajat berturut-turut adalah sebesar 32,23 persen; 23,54 persen, dan 16,16 persen. Sementara itu, persentase

penduduk yang tamat Perguruan Tinggi mencapai sebesar 3,8 persen. Dari tabel diatas dapat kita lihat, baik di kota maupun di desa jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yg menamatkan sekolah tertinggi adalah tamat sekolah dasar (SD). Hal ini didasari karena jumlah sekolah dasar paling banyak dibandingkan SMA atau perguruan tinggi.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat baik laki-laki maupun perempuan. Baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, peningkatan tersebut diiringi dengan menurunnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum tamat SD/MI. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya penduduk yang belum mengikuti program kejar Paket A.

Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus SMA dan perguruan tinggi meningkat dari tahun 2016 ke 2017 pada jenis kelamin perempuan, sedangkan pada laki-laki persentasenya mengalami penurunan. Persentase laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan pada lulusan SMA, namun cenderung seimbang bahkan lebih banyak perempuan pada lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMA laki-laki beberapa cenderung untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan kemungkinan langsung memutuskan untuk mencari pekerjaan.

Gambar 3.2 *Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap tahun 2016-2017*



Sumber: Susenas

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut usia sekolah dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2016-2017

Kelompok umur	2016			2017		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	100,0	99,6	99,8	100,0	100,0	100,0
13-15	97,1	98,0	97,6	97,9	94,3	96,2
16-18	78,6	70,0	74,7	66,1	73,7	69,8
19-24	10,0	13,3	11,5	19,6	13,9	16,9

Sumber: Susenas

Berdasarkan data susenas tahun 2017, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara umum dari tahun 2016 ke 2017. APS untuk kelompok usia 7-12 Tahun dapat dikatakan memuaskan karena nilainya 100 persen baik laki – laki maupun perempuan. APS pada kelompok usia 13-15 tahun terjadi peningkatan APS pada jenis kelamin laki-laki. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan untuk melanjutkan sekolah mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan kelompok umur 16-18, dimana jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan. Kesadaran penduduk laki- laki untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang menengah atas masih rendah. Secara umum APS pada kelompok umur 19-24 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017. peningkatan paling signifikan ada pada jenis kelamin laki-laki. Artinya bahwa laki-laki yang lulus Pendidikan sekolah menengah atas dan melanjutkan Pendidikan tinggi meningkat signifikan bila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.

Sama halnya dengan APS, Angka Partisipasi Murni (APM) secara rata – rata mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2017 pada hampir disemua jenjang kelompok usia sekolah.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut usia sekolah dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2016-2017

Kelompok umur	2016			2017		
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	98,9	99,6	99,2	98,1	100,0	99,0
13-15	81,3	85,3	83,4	82,8	88,4	85,3
16-18	66,2	67,7	66,9	73,0	89,2	80,9
19-24	5,4	12,3	8,6	12,9	10,6	11,8

Sumber: Susenas

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM tahun 2017 pada kelompok umur 7-12 mengalami penurunan dari tahun 2016, hal ini disebabkan oleh penurunan APM pada jenis kelamin laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan kelompok umur 19-24 dimana pada kelompok umur ini jenis kelamin perempuan mengalami penurunan, sedangkan jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa pada jenjang Pendidikan tinggi, jenis kelamin laki – laki mengalami peningkatan dalam melanjutkan pendidikannya . sedangkan jenis kelamin perempuan condong untuk mencari pekerjaan dulu setelah lulus SMA.

KETENAGAKERJAAN

CILACAP

Ketenaga kerjaan menurut undang undang no.13 tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Menurut peraturan tersebut ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja.



Sumber gambar: VectorStock.com

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja tidaklah mungkin program pembangunan dapat dilaksanakan. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan mengingat jumlah dan komposisi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah The Labor Force Concept merujuk pada rekomendasi International Labour Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Kabupaten Cilacap. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penduduk bekerja dan

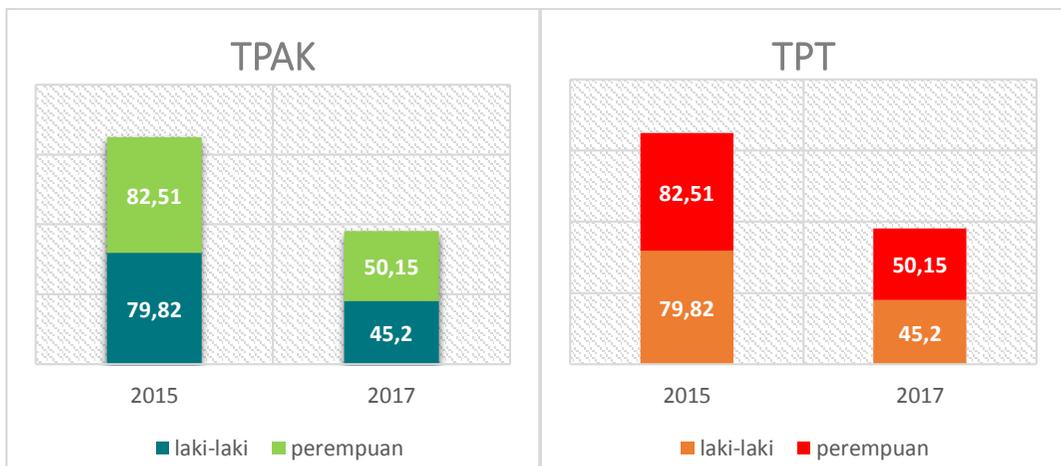
pekerja anak. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015-2017



Sumber: Sakernas

Dari tabel diatas dapat kita lihat, terjadi peningkatan TPAK pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2015 baik itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Analisis TPAK tanpa variabel lainnya tidak akan menarik karena TPAK tidak dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

TPT menggambarkan ketidak seimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di kabupaten Cilacap pada tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan dari 8.01 persen menjadi 6.3 persen. Namun meskipun pengangguran terus menurun, bukan berarti permasalahan ketenagakerjaan sudah teratasi. Masih harus diteliti lebih lanjut, mereka yang sudah bekerja apakah sudah memiliki produktivitas yang tinggi atau tidak, yang salah satunya dapat dilihat dari jam kerja yang digunakan.

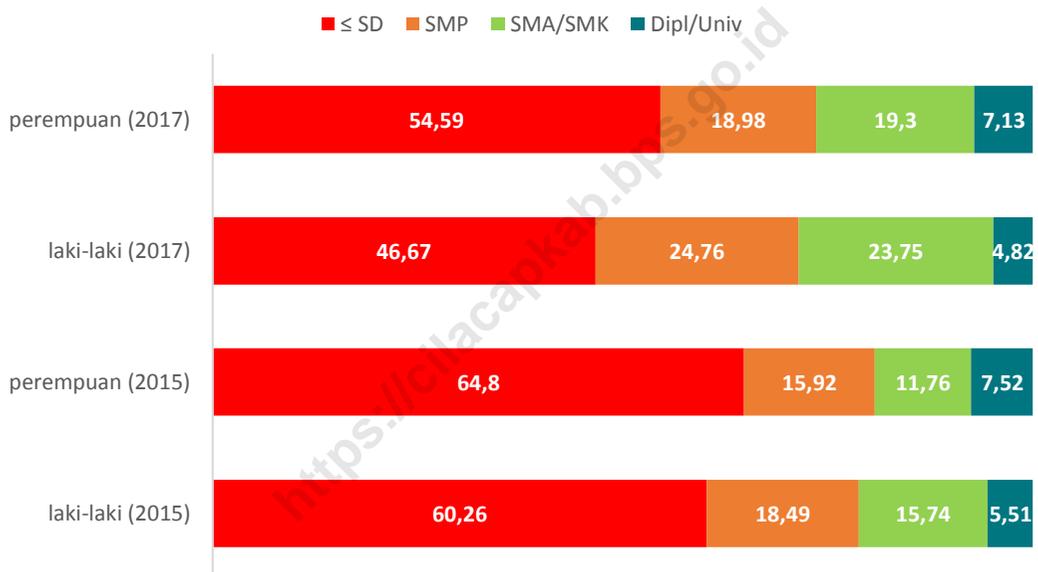
Gambaran TPT menurut jenis kelamin, terlihat pengangguran jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada jenis kelamin perempuan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2015, TPT kedua jenis kelamin mengalami penurunan. Data ini memberikan gambaran positif dimana tingkat kemiskinan bisa sedikit berkurang namun tinggal bagaimana pekerjaan tersebut agar memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga mampu memberikan penghidupan dan dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi, untuk itu mereka berupaya dengan memperoleh pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak segera mendapatkan pekerjaan lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu.

Menurut tingkat pendidikan, ada kecenderungan TPT meningkat lebih besar untuk tingkat pendidikan menengah tinggi. Pada tingkat pendidikan rendah dan yang belum pernah bersekolah hampir semua angkatan kerja dapat tertampung di lapangan

pekerjaan dengan segala kondisi dan jenis pekerjaan. TPT pada jenjang pendidikan SMA/SMK merupakan TPT yang peningkatannya tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain. Sementara TPT pada tingkat perguruan tinggi mengalami penurunan bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan menengah. Hal ini disebabkan tamatan perguruan tinggi tidak sebanyak dibandingkan SMA sehingga sebagian besar lulusan perguruan tinggi masih cukup tertampung pada lapangan pekerjaan yang ada.

Gambar 4.2 *Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015 dan 2017*



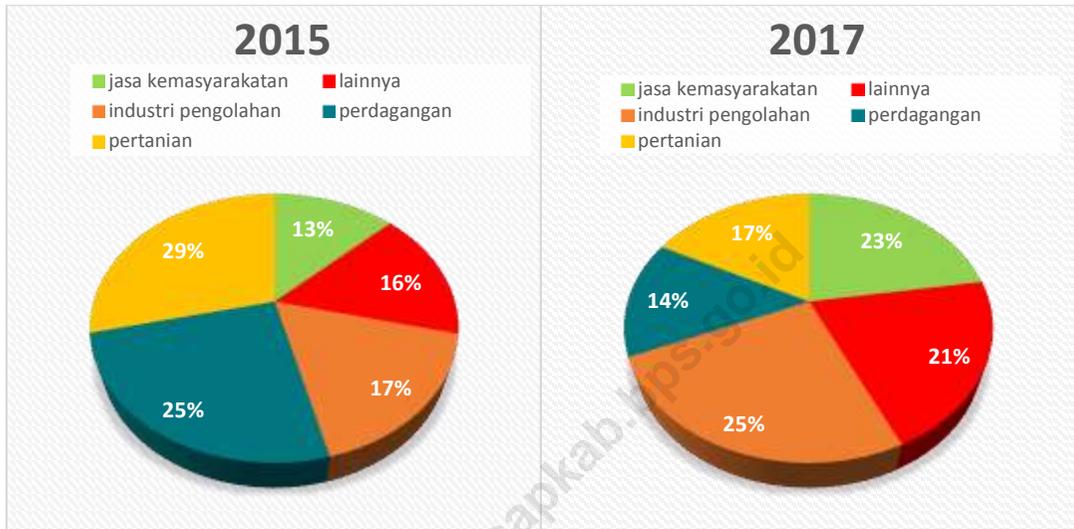
Sumber: Sakernas

LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan), dan jasa-jasa

(perdagangan besar, eceran, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan).

Gambar 4.3 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015 dan 2017



Sumber: Sakernas

Perbandingan perkembangan lapangan usaha antara tahun 2015 dan 2017, berbeda dengan sektor lainnya, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan pada tahun 2015 jumlahnya sebesar 28,71 kemudian mengalami penurunan menjadi 22,5 ditahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh penduduk usia produktif banyak yang tidak mau menjadi petani dan lebih memilih lapangan usaha lainnya. Penurunan di sektor pertanian ini utamanya pada jenis kelamin laki – laki. Peningkatan pekerja menurut lapangan usaha terbanyak ada di sektor industri pengolahan. Penurunan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian semakin lama akan mengakibatkan pada produksi pertanian kita yang semakin menurun.

PEKERJA MENURUT USIA

Berdasarkan usia dan jenis kelamin, penduduk kabupaten cilacap berusia 15-24 yang bekerja mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 3,4 persen menjadi 11,95 persen pada tahun 2017. Peningkatan jumlah pada usia ini menunjukkan bahwa meningkatnya lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja baru. Hal ini akan

sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat cilacap. Sehingga akan membantu mengurangi angka kemiskinan di kabupaten cilacap.

Peningkatan jumlah pekerja pada usia 25-24 yang signifikan terdapat pada jenis kelamin perempuan. Artinya penyerapan tenaga kerja wanita lebih tinggi dibanding tenaga kerja laki – laki. Ini dikarenakan lapangan pekerjaan yang meningkat di kabupaten cilacap adalah lapangan kerja industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja wanita.

Tabel 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015-2017

Golongan Umur	2015			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
15– 24	8,79	10,43	9,4	10,79	13,83	11,95
25 – 54	67,72	64,37	66,47	67,38	63,22	65,79
55 +	23,49	25,2	24,13	21,83	22,94	22,26
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas

**)data tidak tersedia*

TARAF & POLA KONSUMSI CILACAP



Sumber gambar: all-free-download.com

Konsumsi adalah salah satu aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingkat konsumsi yang tinggi akan mendorong kegiatan ekonomi yang lain yaitu produksi. Semakin tinggi tingkat produksi barang dan jasa maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga menunjukkan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat dengan kesejahteraan yang tinggi cenderung mengeluarkan biaya untuk komoditas bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk makanan.

Pengeluaran rumah tangga

Pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan rumah tangga akan menggeser pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk komoditas bukan makanan. Hal ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang sifatnya terbatas sehingga kelebihan pendapatan akan digunakan oleh masyarakat untuk mengkonsumsi komoditas selain makanan, menabung, maupun investasi.

Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per kapita menurut jenisnya di kabupaten Cilacap, 2016-2018

Jenis pengeluaran (1)	Nominal (Rp)		
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)
Makanan	363.466	403.523	416.371
Bukan makanan	357.251	361.015	386.610
-Perumahan dan fasilitas rumah tangga	165.300	162.240	178.116
-Aneka barang dan jasa	93.993	92.131	107.616
-Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	21.971	20.758	21.540
-Barang tahan lama	44.120	52.058	49.752
-Pajak, pungutan, dan asuransi	16.076	20.217	19.342
-Keperluan pesta dan upacara/kenduri	15.755	13.646	10.244
Total	720.717	764.539	802.981

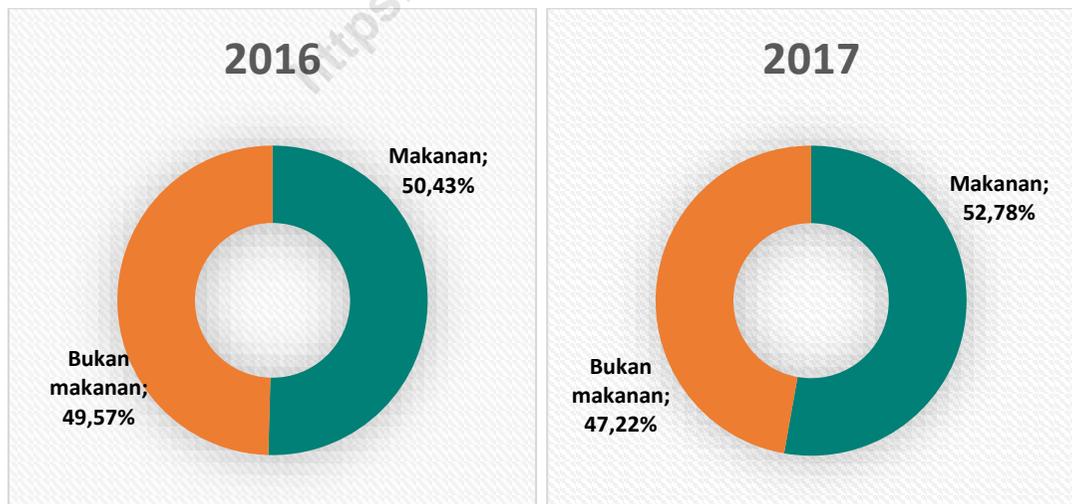
Sumber: Susenas

Pengeluaran per kapita di kabupaten Cilacap meningkat selama tiga tahun terakhir, baik pengeluaran untuk makanan maupun bukan makanan. Kenaikan tersebut mencapai 5 persen setiap tahunnya. Kenaikan pengeluaran untuk makanan lebih besar yaitu sekitar 3 persen di tahun 2018. Harga bahan-bahan makanan yang melonjak menjadi salah satu penyebab kenaikan untuk pengeluaran jenis tersebut. Untuk pengeluaran bukan makanan, kenaikan paling tinggi dialami untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga. Harga tanah dan bangunan di wilayah Cilacap semakin mahal. Hal ini disebabkan semakin banyak penduduk yang bermigrasi masuk ke Cilacap terutama para pekerja dengan adanya beberapa mega proyek seperti: PLTU Kesugihan dan pembangunan kilang minyak baru Pertamina. Para migran masuk membutuhkan fasilitas tempat tinggal sehingga permintaan terhadap perumahan meningkat.

Proporsi pengeluaran makanan terhadap pengeluaran bukan makanan cenderung semakin tinggi. Dengan kata lain kesejahteraan masyarakat Cilacap belum meningkat. Fokus pengeluaran rumah tangga baru pada pemenuhan kebutuhan makan. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga bahan-bahan makanan di Cilacap. Tercatat inflasi di Cilacap khususnya untuk bahan makanan dan makanan jadi cukup tinggi.

Gambar 5.1 Proporsi pengeluaran rumah tangga di kabupaten Cilacap, 2016-2018

Sumber: Susenas



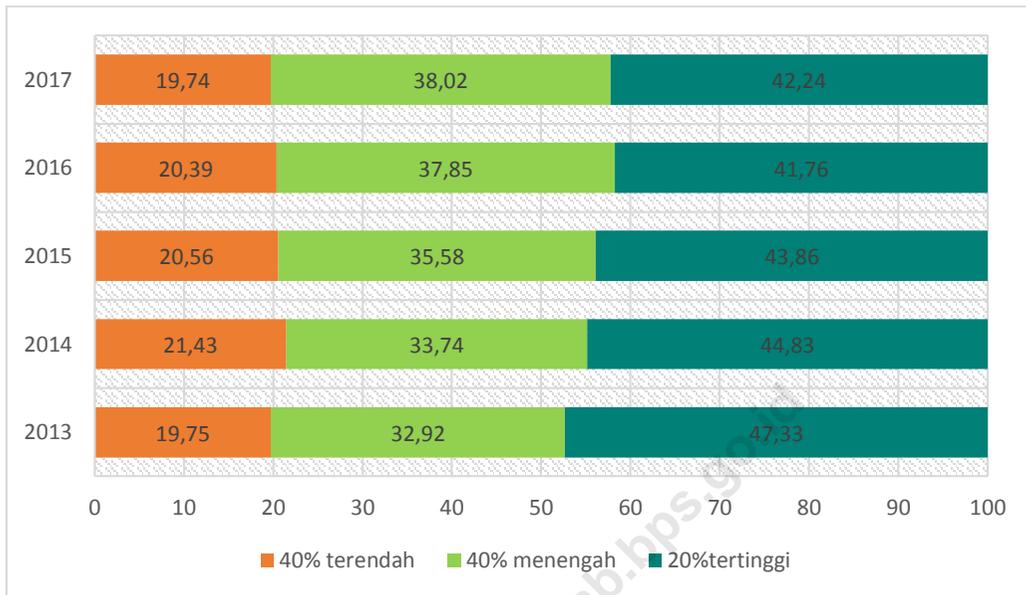


Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Bank Dunia. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia. Berdasarkan kriteria tersebut penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu: 40 persen berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen berpendapatan tinggi. Kelas yang menjadi fokus perhatian adalah penduduk 40 persen berpendapatan rendah. Jika mereka memperoleh lebih dari 17 persen maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten Cilacap masih tergolong rendah. Hal yang sejalan juga ditunjukkan dari nilai indeks Gini. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Nilainya berkisar diantara 0 dan 1, dimana mendekati 0 maka ketimpangan semakin rendah.

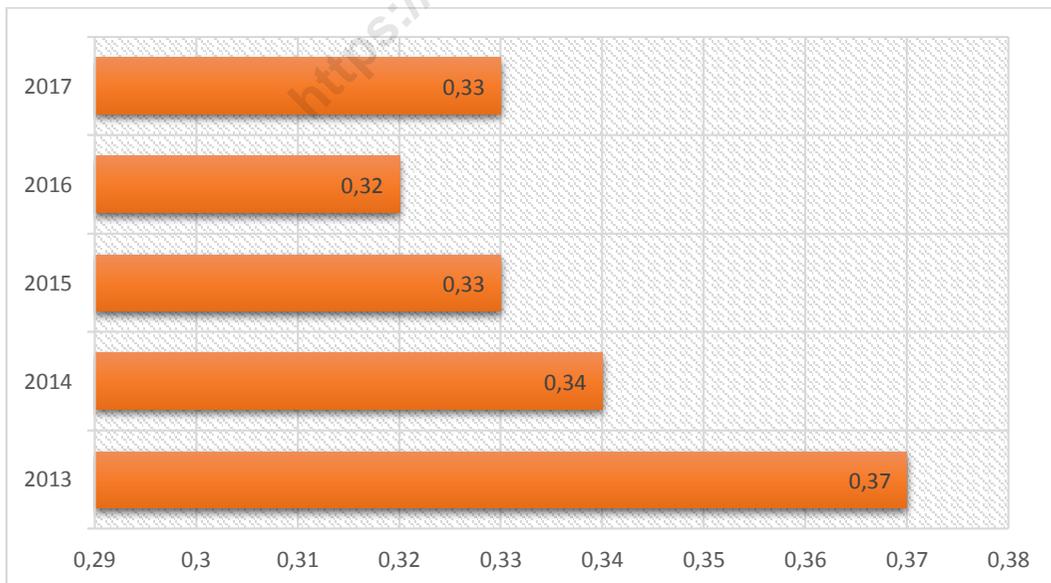
Akan tetapi, ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia memiliki kecenderungan turun. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan diantara penduduk Cilacap berpotensi semakin besar. Ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial kedepannya. Pemerintah harus mewaspadai fenomena ketimpangan pendapatan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran bagi semua penduduk sehingga sebaiknya hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kalangan.

Gambar 5.2 Distribusi pembagian pengeluaran per kapita di kabupaten Cilacap, 2013-2017



Sumber: Susenas

Gambar 5.3 Indeks Gini kabupaten Cilacap, 2013-2017



Sumber: Susenas

Konsumsi kalori dan protein

Konsumsi kalori dan protein dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan perkalian kuantitas makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia adalah konsumsi kalori sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2 Konsumsi energi dan protein per kapita per hari menurut daerah tempat tinggal di kabupaten Cilacap, 2016-2018

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2016	1895,36	1969,91	1943,20
2017	2044,91	2046,83	2046,10
2018	2006,96	2047,63	2031,71
Protein (gram)			
2016	51,75	51,81	51,79
2017	57,86	55,2	56,21
2018	55,43	53,63	54,33

Sumber: Susenas

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, kecukupan gizi penduduk Cilacap baik kebutuhan kalori maupun protein belum memenuhi standar yang sudah ditentukan. Standar yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2013 dimana angka kecukupan energi sebesar 2150 kalori dan protein sebesar 57 gram. Konsumsi energi penduduk perkotaan lebih kecil dibandingkan penduduk perdesaan. Mereka cenderung lebih banyak mengonsumsi protein karena ketersediaan pangan yang lebih beragam di perkotaan. Konsumsi masyarakat perdesaan lebih ke makanan pokok yang mudah dijangkau oleh mereka.

PERUMAHAN CILACAP

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Pemenuhan atas kebutuhan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian pula dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan



Sumber gambar: freepik.com

Kawasan Permukiman (UU-PPK) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan manusia.

Pemenuhan kebutuhan rumah juga tertuang dalam kesepakatan internasional SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Pada tujuan ke enam terfokus pada upaya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Pada tujuan ke tujuh fokus pada energi bersih dan terjangkau, dengan akses yang terjangkau pula, andal, berkelanjutan, modern untuk semua. Tujuan ke sebelas fokus pada kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai rumah tinggal juga menunjukkan status sosial seseorang. Semakin baik status sosialnya maka semakin baik pula pemenuhan kebutuhan perumahannya.

Gambaran perumahan di Indonesia

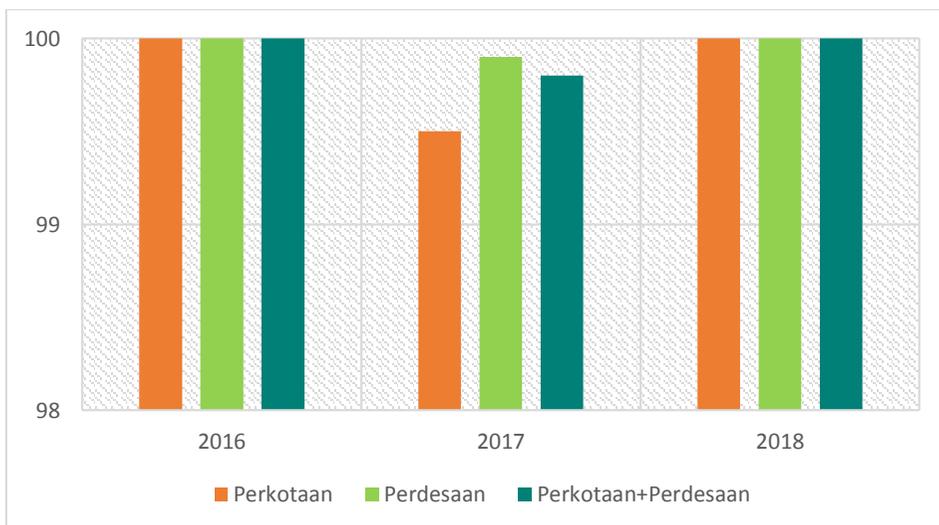
Pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia cukup baik. Lebih dari 80 persen rumah tangga menempati rumah milik sendiri. Akan tetapi, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir persentasenya semakin menurun. Harga rumah dan tanah yang semakin melonjak menjadi penyebabnya. Menurut catatan perhimpunan pengusaha Real Estate Indonesia (REI), kenaikan harga rumah di kota besar mencapai

10-30 persen. Angka tersebut melebihi angka inflasi nasional yang berkisar 5 persen setiap tahunnya. Tingginya kenaikan harga rumah membuat masyarakat lebih memilih sewa atau kontrak untuk menghemat biaya. Ataupun kalau membeli rumah dengan kualitas yang seadanya sesuai dengan budget yang dimiliki. Padahal, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak harus melihat dari tiga aspek yaitu: kondisi bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungannya.

Kondisi fisik bangunan

Kondisi fisik bangunan yang menjadi komponen utama rumah adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan luas lantai. Atap merupakan bagian dari struktur bangunan tempat tinggal yang berfungsi sebagai penutup secara langsung dari gangguan hujan, sinar matahari, dan angin. Kriteria atap rumah yang layak adalah terbuat dari material beton/genteng/asbes/seng/bambu/kayu. Berdasarkan data Susenas material atap yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sudah layak (lebih dari 99 persen). Genteng tanah liat mendominasi jenis material atap. Pasokan genteng tanah liat dari wilayah tetangga (Kabupaten Kebumen) membuat jenis material ini selalu tersedia dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat Cilacap. Selain itu, pengaruh modernisasi terhadap struktur bangunan rumah di Cilacap juga mulai terasa. Sekitar 2 persen rumah tangga di Cilacap, baik daerah perkotaan maupun perdesaan, sudah menggunakan genteng metal yang harga dan kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan genteng tanah liat.

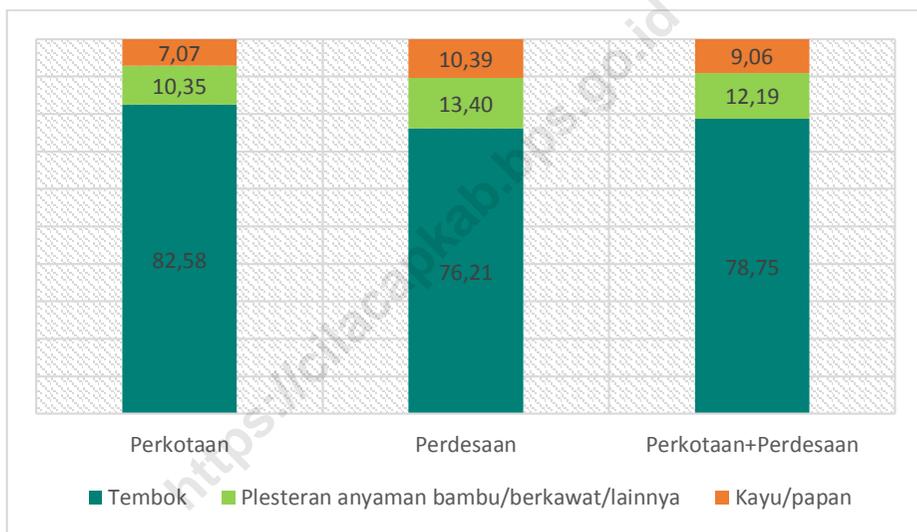
Gambar 6.1 Persentase rumah dengan atap layak, Kabupaten Cilacap 2016-2018



Sumber: Susenas

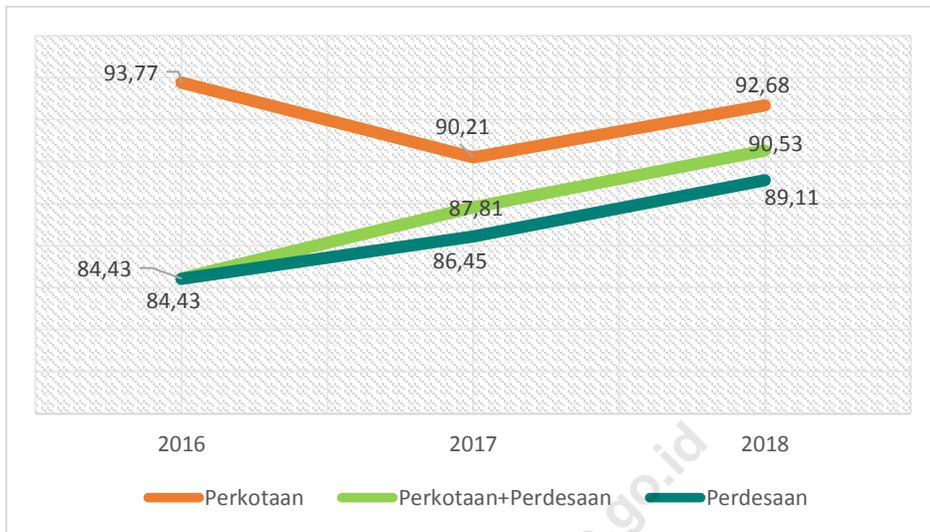
Komponen utama rumah berikutnya adalah jenis dinding. Dinding dikatakan memenuhi syarat kelayakan jika bersifat tidak lembab dan tidak mudah ditembus angin. Jenisnya yaitu dinding yang terbuat dari tembok atau kayu. Lebih dari 80 persen perumahan di Cilacap sudah memiliki dinding yang layak. Sebagian besar memakai jenis dinding tembok baik di perkotaan maupun perdesaan. Akan tetapi, tingkat kelayakan tersebut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah. Tingkat kelayakan rumah dari segi dinding untuk provinsi Jawa Tengah sudah bertengger di kisaran 90 persen. Di Kabupaten Cilacap masih banyak masyarakat yang menggunakan dinding dari anyaman bambu, khususnya di wilayah perdesaan.

Gambar 6.2 Persentase rumah menurut jenis dinding, Kabupaten Cilacap 2018



Sumber: Susenas

Indikator kelayakan dari sebuah rumah dilihat pula dari jenis lantai yang digunakan. Rumah dianggap layak huni jika lantainya terbuat dari material selain tanah, seperti: maremer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu. Persentase rumah dengan lantai layak di Kabupaten Cilacap terus meningkat selama tiga tahun terakhir, terutama di daerah perdesaan. Masyarakat perdesaan mulai mempunyai kemampuan ekonomi untuk membangun rumah dengan lantai yang layak.

Gambar 6.3 Persentase rumah berlantai layak, Kabupaten Cilacap 2016-2018


Sumber: Susenas

Selain dari jenisnya, kelayakan lantai rumah juga dilihat dari luasannya. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang adalah minimal 10 meter persegi. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Untuk kondisi Kabupaten Cilacap lebih dari 90 persen perumahan yang ada sudah memenuhi standar kelayakan luas lantai yaitu lebih dari 10 meter persegi per orangnya. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita, 2016-2017

Luas lantai per kapita	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<= 7,2 m ²	2,22	0,64	3,28	1,04	0,79	1,68	1,46	0,73	2,32
7,3-9,9 m ²	4,71	5,27	4,04	6,17	4,71	3,85	5,66	4,91	3,93
>= 10 m ²	93,07	94,09	92,68	92,79	94,50	94,47	92,88	94,35	93,76

Sumber: Susenas

Fasilitas perumahan

Sesuai dengan perkembangan zaman, rumah tidak lagi sekedar sebagai tempat berlindung tetapi juga mendukung kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Rumah yang layak huni akan meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Selain dari kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan juga mencerminkan tingkat kelayakan hunian. Fasilitas tersebut meliputi: sumber air minum, sumber penerangan, dan tempat buang air besar yang digunakan.

Penyediaan air bersih merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Cilacap cukup memadai. Pada tahun 2018 hanya 35 persen penduduk yang harus membeli untuk air minum, sisanya dapat dipenuhi dengan tidak membeli (menggunakan sumber air minum yang sudah ada). Masyarakat Cilacap memilih sumber air minum dari sumur bor/pompa dan sumur terlindung sebagai pilihan utama berada pada kisaran 40 persen. Penggunaan air kemasan bermerk dan air isi ulang juga mulai marak khususnya di daerah perkotaan. Kedua jenis sumber air minum tersebut semakin meningkat penggunaannya oleh masyarakat Cilacap karena dianggap lebih praktis dan higienis.

Selain air minum, fasilitas perumahan yang penting adalah sumber penerangan. Sumber penerangan ideal adalah yang berasal dari listrik (baik dari PLN maupun Non PLN). Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Semakin baik penerangan rumah maka semakin baik pula tingkat kehidupan penghuni-penghuni di dalamnya. Mereka dapat melakukan aktivitas baik di siang maupun malam hari. Lebih dari 99 persen rumah di wilayah Kabupaten Cilacap sudah memakai penerangan listrik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penggunaan jamban juga menjadi salah satu kriteria dalam penentuan fasilitas rumah yang baik. Jamban yang dimiliki sendiri oleh rumah tangga dengan pembuangan *septic tank* menjadi kriteria terbaik untuk fasilitas pembuangan air besar. Di kabupaten Cilacap, sekitar 80 persen perumahan sudah memenuhi kriteria tersebut. Akan tetapi, penyediaan jamban yang layak harus lebih ditingkatkan terutama di daerah perdesaan karena masih banyak penduduk yang menggunakan jamban bersama dengan tempat pembuangan akhir di kolam/sawah/sungai/danau/laut. Dengan meningkatkan kualitas pembuangan akhir diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan. Angka kesakitan di Kabupaten Cilacap termasuk tinggi yaitu berada pada kisaran 30 persen selama tiga tahun terakhir.

Tabel 6.2 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan, 2016-2017

Fasilitas perumahan	Perkotaan			Perdesaan		Perkotaan+perdesaan	
	2016	2017	2018	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)
Penerangan listrik	100,0	99,8	99,5	99,3	99,8	99,6	99,8
Air minum kemasan/ledeng	45,5	42,9	21,5	25,1	24,0	32,5	30,5
Jamban sendiri dengan septik tank	80,8	84,6	84,8	78,7	78,3	79,5	80,7

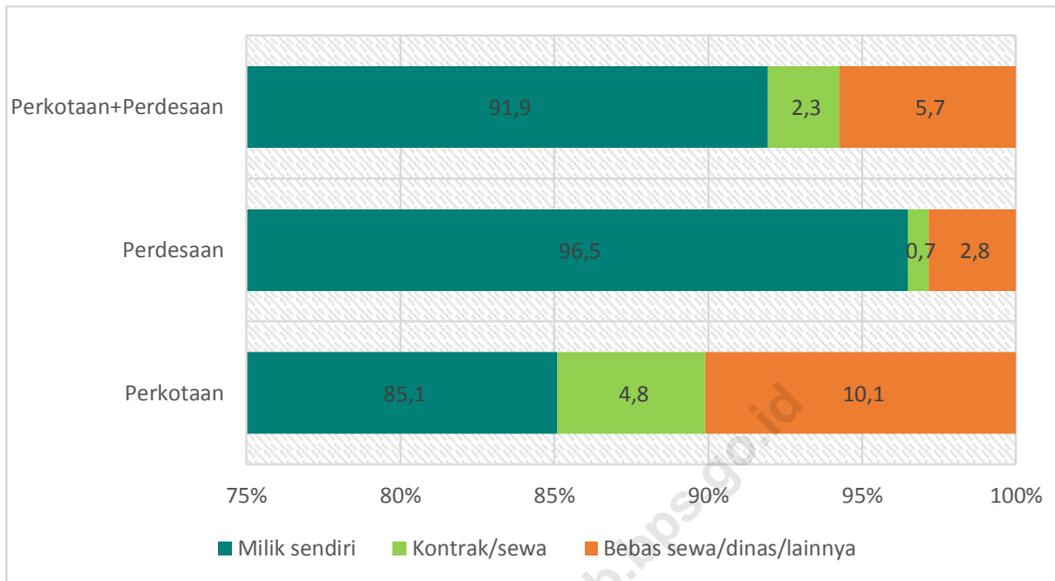
Sumber: Susenas

Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah menjadi indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Semakin baik tingkat kesejahterannya maka semakin baik pula status kepemilikan rumahnya. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih memilih memiliki rumah sendiri dibandingkan kontrak atau sewa. Bahkan, orang-orang dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi menjadikan rumah sebagai salah satu investasi mereka bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan pokok. Hal tersebut membuat harga rumah terus melonjak setiap tahunnya. Lonjakan tersebut sangat dirasakan di Kabupaten Cilacap dimana tahun 2017 inflasi tahunan untuk kelompok barang perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar mencapai 7 persen.

Sekitar 90 persen rumah yang dihuni di Kabupaten Cilacap merupakan rumah milik sendiri. Persentase kepemilikan rumah di perkotaan lebih sedikit dibandingkan di wilayah perdesaan. Hal tersebut masih berkaitan dengan tingginya harga perumahan khususnya di wilayah perkotaan Cilacap. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah, banyak yang memilih kontrak atau sewa. Banyaknya pekerja pendatang di perkotaan Cilacap juga mendorong kebutuhan perumahan yang bersifat sementara yaitu dengan kontrak atau sewa. Mega proyek yang ada di Cilacap seperti: Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC), kilang minyak Pertamina, dan PLTU Kesugihan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pekerja pendatang bahkan pekerja asing untuk tinggal di Cilacap selama proyek berlangsung.

Gambar 6.4 Status kepemilikan rumah berdasarkan tipe wilayah di Kabupaten Cilacap tahun 2018



Sumber: Susenas

KEMISKINAN CILACAP

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap dalam dua tahun terakhir menurun, begitu pula persentasenya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai 193 ribu jiwa atau sekitar 11 persen dari total penduduk Cilacap. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah angka kemiskinan sebesar 10 persen sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap belum berhasil mencapai target tersebut. Meskipun demikian penurunan persentase penduduk miskin dalam kurun waktu 5 tahun cukup signifikan dimana pada tahun 2014 mencapai 14 persen dan di tahun 2018 11 persen. Program-program pengentasan kemiskinan harus dilanjutkan kembali dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka terlepas dari lingkaran kemiskinan.

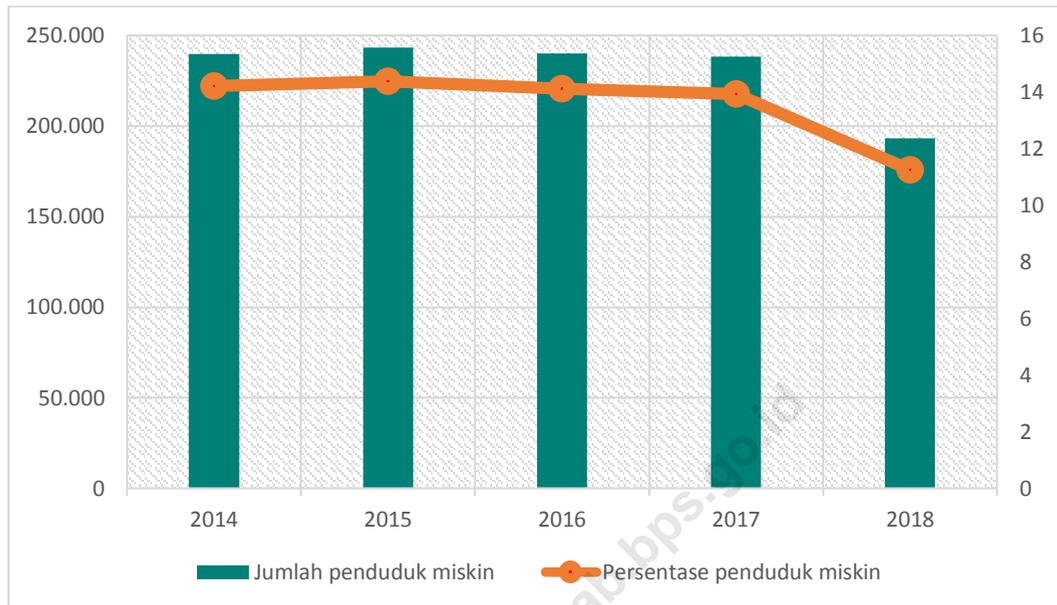


Sumber gambar: VectorStok.com

Perkembangan penduduk miskin

Pembangunan adalah suatu upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Salah satu agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah pengurangan kemiskinan. Kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik yang berbentuk makanan maupun non makanan. Untuk mengukur kemiskinan secara makro, BPS mengadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan setiap tahunnya sampai dengan level kabupaten/kota. Dari survei tersebut akan didapatkan indikator-indikator untuk mengukur kemiskinan seperti: jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Gambar 7.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap 2014-2018



Sumber: Susenas

BPS menggunakan indikator Garis Kemiskinan (GK) dalam menentukan kemiskinan secara makro. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan. Kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Kebutuhan nonmakanan meliputi: perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin, begitu pula sebaliknya. Garis kemiskinan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 garis kemiskinan kabupaten Cilacap sekitar 292 ribu rupiah kemudian meningkat dan berada pada posisi 320 ribu rupiah. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup masyarakat dengan mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) juga turut mendorong peningkatan garis kemiskinan.

Gambar 7.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten Cilacap, 2016-2018



Sumber: Susenas

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, semakin kecil nilai indeks maka semakin baik kondisi penduduk miskin. Nilai kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Cilacap semakin kecil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa program untuk mengurangi kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Meskipun masih ada penduduk miskin di Cilacap, tetapi kesenjangan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan masyarakat yang tidak miskin hampir mendekati.

Hal yang sejalan terekam pula pada indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks tersebut memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin rendah nilai indeks maka semakin kecil pula ketimpangan diantara penduduk miskin. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Cilacap bergerak turun signifikan mulai tahun 2017. Semakin homogen kondisi penduduk miskin semakin mudah pula untuk melakukan program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi upaya penanggulangan kemiskinan harus tetap ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengentaskan semua penduduk miskin. Informasi karakteristik rumah tangga miskin juga sangat bermanfaat untuk pencahangan program kemiskinan terbaru. Sehingga pada ulasan berikutnya akan dibahas karakteristik rumah tangga miskin yang meliputi: pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan kondisi perumahan rumah tangga miskin.

Karakteristik pendidikan ruta miskin

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar pula kesempatan seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dan terbebas dari kemiskinan. Dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dalam dua tahun terakhir kondisi penduduk miskin mengalami perbaikan. Persentase yang lulus SD/SMP dan tamat SMA/lebih meningkat. Kesadaran penduduk miskin terhadap pentingnya pendidikan mulai timbul. Angka melek huruf hampir mencapai 100 persen dimana mengindikasikan bahwa seluruh penduduk miskin memiliki kemampuan baca tulis yang baik. Hal yang perlu menjadi perhatian di Cilacap adalah menurunnya partisipasi sekolah anak. Persentase keikutsertaan anak pada rumah tangga miskin di jenjang SMP semakin menurun. Tugas orang tua dan pemerintah yang wajib mengawal kesadaran mereka untuk menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya sampai dengan lulus pendidikan dasar.

Tabel 7.1 Karakteristik pendidikan rumah tangga miskin di Cilacap, 2016-2017

Karakteristik pendidikan (1)	2016 (2)	2017 (3)
1. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan		
Tidak tamat SD	39,18	21,51
Tamat SD/SMP	50,17	59,82
Tamat SMA/lebih	10,65	18,67
2. Angka melek huruf		
15-24 tahun	100,00	100,00
15-55 tahun	99,37	99,01
3. Angka Partisipasi sekolah		
7-12 tahun	100,00	100,00
13-15 tahun	91,99	84,42

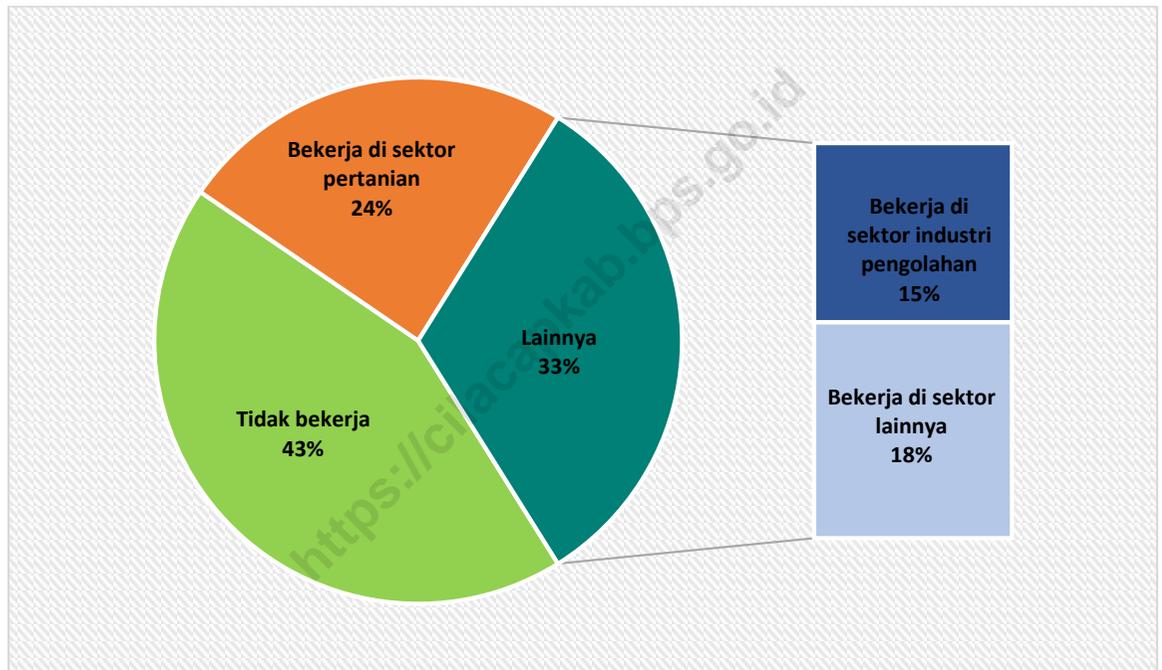
Sumber: Susenas

Karakteristik ketenagakerjaan ruta miskin

Bekerja adalah salah satu upaya untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga miskin memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Berdasarkan data Susenas 2018, sebagian besar penduduk miskin di Cilacap bekerja. Pekerjaan mereka didominasi di sektor pertanian dan industri

pengolahan. Kedua sektor tersebut memang merupakan penyokong terbesar perekonomian Cilacap sehingga sangat dimungkinkan bahwa banyak orang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan industri pengolahan akan sangat berdampak pada penduduk miskin. Semakin berkembangnya sektor-sektor tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan, khususnya bagi penduduk miskin di Cilacap.

Gambar 7.3 Kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin di Cilacap tahun 2018



Sumber: Susenas

Karakteristik kesehatan rupa miskin

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Manusia yang sehat dapat melakukan aktivitas dengan optimal. Semakin jarang terkena penyakit maka produktivitas manusia tersebut juga semakin tinggi. Kondisi kesehatan penduduk miskin di Cilacap harus ditingkatkan lagi. Angka kesakitan untuk penduduk miskin berada pada kisaran 20 persen, bahkan lebih dari 35 persen di tahun 2016. Artinya bahwa 1 dari 3 penduduk miskin pernah mengalami gangguan kesehatan. Gangguan tersebut akan menghambat produktivitas yang berujung pada semakin berkurangnya

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Disinilah peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, khususnya bagi penduduk miskin.

Penggunaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mutlak diperlukan oleh penduduk miskin ketika mereka mengalami gangguan kesehatan. Namun, belum semua memiliki fasilitas tersebut. Pada tahun 2018 baru separuh penduduk miskin di Cilacap yang dilindungi oleh asuransi gratis dari pemerintah tersebut. Sisanya tidak memiliki asuransi kesehatan untuk menjamin pengobatan mereka. Informasi tentang asuransi BPJS PBI juga harus disebarluaskan dengan masif agar penduduk miskin mengetahui kegunaanya. Pada saat melakukan pengobatan mereka lebih memilih tidak menggunakan fasilitas BPJS PBI.

Gambar 7.4 *Persentase penduduk miskin di Cilacap yang mengalami gangguan kesehatan, 2016-2018*



Sumber: Susenas

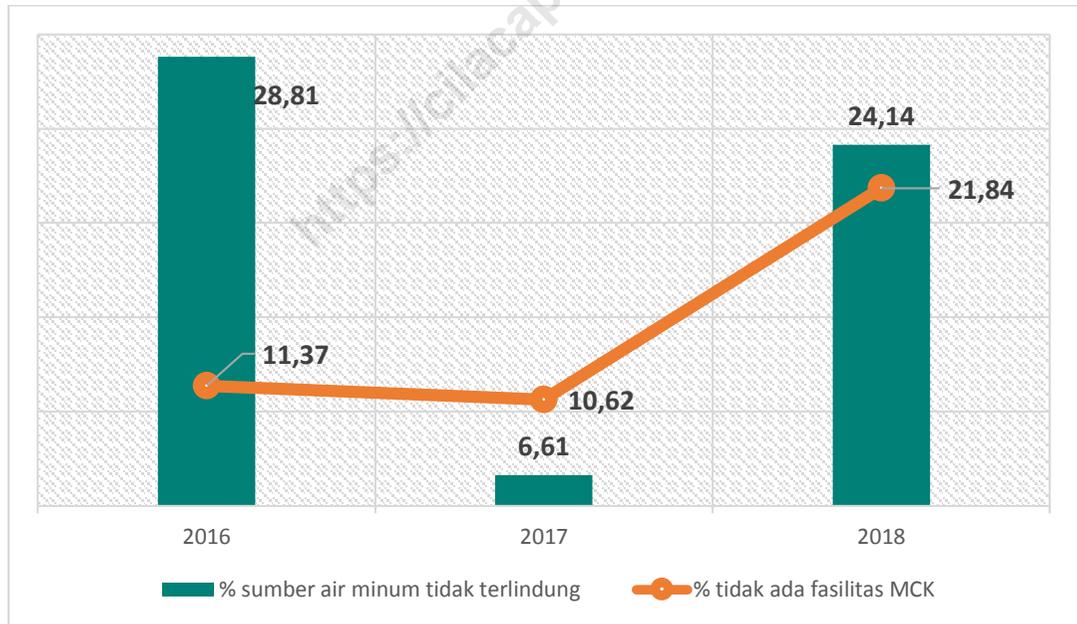
Karakteristik perumahan ruta miskin

Kondisi rumah sangat berpengaruh terhadap kesehatan penghuninya. Semakin bersih suatu rumah maka peluang penyebaran kuman penyakit akan semakin kecil. Sehingga para penghuni rumah tersebut tetap terjaga kesehatannya. Derajat kesehatan yang tinggi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bekerja dengan lebih baik dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian pula kondisi yang berlaku untuk rumah tangga miskin. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas perumahan yang layak untuk mereka. Kondisi perumahan yang baik akan menciptakan peluang hidup sehat sehingga produktivitasnya ikut terdongkrak pula. Di kabupaten Cilacap, sebagian besar rumah tangga miskin menggunakan sumur terlindung sebagai sumber mata airnya sekitar 30 persen. Namun, masih banyak juga yang menggunakan sumber air minum yang tidak terlindung seperti: sumur terbuka, mata air terbuka, dan air hujan. Hampir 25 persen rumah tangga miskin pada tahun 2018 terancam terkena paparan penyakit karena menggunakan sumber air minum yang tidak layak tersebut.

Hal yang sejalan terjadi pada fasilitas untuk mandi, cuci, dan kakus. Semenjak tiga tahun terakhir di Cilacap kondisinya memprihatinkan. Semakin banyak rumah tangga miskin yang tidak memiliki fasilitas MCK untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini akan membuat rumah tangga miskin semakin rentan terhadap paparan penyakit.

Gambar 7.5 Persentase rumah tangga miskin Cilacap yang tidak memiliki fasilitas MCK dan sumber air minumnya tidak terlindung, 2016-2018



Sumber: Susenas

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

Jl. Dr. Soetomo No 18 A Cilacap 53212

Telp. (0282) 534328, Fax. (0282) 535011

Homepage: <https://cilacapkab.bps.go.id>

E-mail: bps3301@mailhost.bps.go.id